

ace Rll

**COMMITMENT TO THE PROCESS DALAM PROGRAM “DASHAT” DI  
DESA SURENGEDE DITINJAU DARI PERSPEKTIF COLLABORATIVE  
GOVERNANCE**

**Azzahra Alifia Putri<sup>1</sup>, Retna Hanani<sup>2</sup>**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465406

Laman : [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*Collaborative Governance is one of the government's efforts to overcome various public problems. Based on previous research, one of the obstacles in the collaborative governance process is the commitment to the process held by stakeholders. This study discusses the commitment to the process in eliminating stunting. This study took Surengede Village as the research locus. Surengede Village became a pilot project for the DASHAT program. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The purpose of this study was to determine the commitment to the process in the DASHAT program in Surengede Village reviewed from the perspective of collaborative governance studied with elements of mutual recognition of interdependence, shared ownership of the process, and exploring to mutual gains and to determine the factors of commitment to the process. The results of this study indicate that the formation of commitment to the process in the DASHAT program in Surengede Village by stakeholders is not perfect. This is indicated by several elements that have not been fulfilled and stakeholder understanding of stunting is very minimal. In addition, there are several factors of commitment to the process that are not optimal*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Stakeholder, Stunting*

## ABSTRAK

*Collaborative Governance* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan berbagai masalah publik. Berdasarkan penelitian terdahulu, salah satu hal yang menjadi hambatan dalam proses *collaborative governance* adalah *commitment to the process* yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Penelitian ini membahas mengenai *commitment to the process* dalam mengentaskan *stunting*. Penelitian ini mengambil Desa Surengede menjadi lokus penelitian. Desa Surengede menjadi *pilot project* dari program DASHAT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *commitment to the process* dalam program DASHAT di Desa Surengede ditinjau dari perspektif *collaborative governance* dikaji dengan elemen *mutual recognition of interdependence*, *shared ownership of process*, dan *exploring to mutual gains* serta untuk mengetahui faktor-faktor *commitment to the process*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan *commitment to the process* dalam program DASHAT di Desa Surengede oleh para *stakeholder* belum sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa dimensi yang belum terpenuhi serta pemahaman *stakeholder* mengenai *stunting* sangat minim. Selain itu, terdapat beberapa faktor dari *commitment to the process* yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance, stakeholder, stunting*

## Pendahuluan

Menurut *World Health Organization* (2015) *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Selanjutnya, mengacu dari Kemenkes (2022), *stunting* atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak ditandai dengan panjang atau tinggi yang kurang jika dibandingkan dengan usia dan jenis kelamin yang diukur dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. *Stunting* pada anak dapat terjadi jika status gizi pada anak tersebut sangat kurang dalam jangka waktu yang lama. Status gizi *stunting* atau yang sering disebut dengan balita pendek didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U. Selanjutnya, Berdasarkan Laporan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki tingkat *stunting* tertinggi di Jawa Tengah dengan angka mencapai 13,9%. Permasalahan ini menjadi penting dikarenakan angka yang tercapai melampaui angka capaian Provinsi

Jawa Tengah yang hanya mencapai 8,6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Wonosobo belum bisa menyelesaikan permasalahan mengenai *stunting*.

Data RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menurunkan prevalensi *stunting* tidak mencapai target. Hal ini dibuktikan dengan realisasi capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2021 yang hanya mencapai 76,60%. *Stunting* juga menjadi isu permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya. Isu permasalahan *stunting* berlanjut hingga tahun 2021. Adanya keberlanjutan ini juga menyebabkan *stunting* menjadi isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Berbagai program kerja diselenggarakan dalam mewujudkan *Zero Stunting* 2024. Salah satunya adalah DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting. DASHAT merupakan pusat gizi dan pelayanan pada baduta *stunting*, ibu menyusui, dan ibu hamil KEK. Program DASHAT merupakan

program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini telah direalisasikan di berbagai desa maupun kecamatan di seluruh Indonesia termasuk di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar. Program DASHAT *launching* di Wonosobo pada 30 September 2021 dan dilaksanakan di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar, Kabupaten. Desa Surengede merupakan *pilot project* pelaksanaan DASHAT di Kabupaten Wonosobo. Penetapan Desa Surengede sebagai *pilot project* dari pelaksanaan Program DASHAT di Kabupaten Wonosobo bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan data di atas, terdapat 93 baduta dan balita *stunting* di Desa Surengede. Hal tersebut mengindikasikan bahwa prevalensi *stunting* di Desa Surengede yang masih melambung tinggi. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo No 440/37/2021 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021, Desa Surengede termasuk dalam salah satu dari 15

desa lokus *stunting* di Kabupaten Wonosobo

Program DASHAT memerlukan sinergi dari semua sektor karena program ini merupakan program multisector. Dalam keberjalanannya, program ini didukung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Wonosobo sebagai pihak pemerintah. Selanjutnya, pada pihak masyarakat terdapat kader penggerak desa. Selanjutnya, dalam pihak swasta terdapat kolaborasi antara Aqua Wonosobo dengan menggandeng LPTP Surakarta sebagai mitra dan membentuk CSR bernama TANGKAS (Tanggap Gizi dan Kesehatan Anak Stunting).

Berdasarkan *website* BKKBN, pelaksanaan DASHAT di Desa Surengede selalu dihadiri oleh bidan desa, TPK Desa Surengede, dan pihak TANGKAS yang mencakup Aqua Wonosobo dan LPTP Surakarta. Kegiatan DASHAT diawali dengan pembuatan makanan di dapur yang sudah disiapkan sesuai ketentuan

hingga proses pengantaran ke rumah-rumah balita *stunting* sehingga makanan dapat dipastikan sampai ke rumah balita sasaran Program DASHAT. Lebih jauh, semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait.

Walaupun menjadi *pilot project* di tahun 2021, pelaksanaan Program DASHAT di Desa Surengede tidak mengalami keberlanjutan di tahun-tahun setelahnya. Mengacu pada Buku Pegangan Program DASHAT Untuk Mahasiswa Peduli *Stunting* yang diterbitkan oleh BKKBN pada tahun 2022, keberlanjutan menjadi instrument penting dalam penyelenggaraan Program DASHAT di desa sasaran. Pelaksanaan Program DASHAT di Desa Surengede hanya dilaksanakan di tahun 2021. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Desa Surengede hanya menyelenggarakan Program DASHAT sebanyak satu kali periode saja. Permasalahan ini mencerminkan komitmen para *stakeholder* dalam mengentaskan *stunting* di Desa Surengede mengingat pada tahun 2022 prevalensi *stunting* di Kecamatan

Kejajar masih melambung tinggi. Berdasarkan hasil penimbangan serentak Kabupaten Wonosobo pada Agustus 2022 yang dihimpun dalam ePPGBM, prevalensi *stunting* di Desa Surengede masih mencapai 30,7%.

Kabupaten Wonosobo telah menyelenggarakan berbagai program dalam rangka menurunkan prevalensi angka *stunting* di Kabupaten Wonosobo untuk mencapai *Zero Stunting 2024*. Hal tersebut mengindikasikan adanya langkah baik dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Namun begitu, semua keberjalanan Program DASHAT masih menemui hambatan. Sebagian dari program-program terkait, belum ada keberlanjutan dan monitoringnya. Pelaksanaan program DASHAT tentunya membutuhkan komitmen yang besar dari semua pihak yang terlibat. Komitmen tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam mengentaskan *stunting* di Desa Surengede maupun di Kabupaten Wonosobo. Namun begitu, kurangnya komunikasi antar-sektor menjadi rintangan yang bisa menjadi

hambatan dalam mencapai tujuan *Zero Stunting 2024*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti bermaksud untuk mendalaminya dan menggambarkan peristiwa yang sebenarnya di lapangan dengan memanfaatkan data dari para responden terkait. Adapun lokus tempat penelitian berada di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Subjek penelitian ini adalah *stakeholder* yang terlibat dalam program DASHAT di Desa Surengede. Kemudian, sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Analisis dan interpretasi data yang digunakan adalah dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta kualitas data menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber terkait.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini melakukan analisis mengenai *commitment to the*

*process* dalam program DASHAT di Desa Surengede ditinjau dari perspektif *collaborative governance*. Kemudian, penelitian ini juga melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *commitment to the process* dalam program DASHAT. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk kalimat serta pernyataan informasi yang disampaikan oleh para informan pada sesia wawancara yang telah dilaksanakan. Lebih jauh, hasil wawancara akan dituangkan ke dalam bentuk penelitian kualitatif yang akan menganalisis fenomena yang telah ditemukan di lapangan.

### **Dimensi *Commitment To The Process* Dalam Program DASHAT di Desa Surengede Ditinjau Dari Perspektif *Collaborative Governance***

Menurut Ansel & Gash (Dalam Tinessia, 2023) dalam *commitment to the process* terdapat 3 dimensi penting yang dapat dikaji melalui:

- a) *Mutual Recognition of Interdependence*

Menurut Ansell & Gash (2008), *Mutual recognition of interdependence* adalah pengakuan atas saling ketergantungan dalam hal ini adalah pengakuan ketergantungan dalam melaksanakan kolaborasi. Elemen ini membahas mengenai pandangan dan pemahaman *stakeholder* mengenai program DASHAT. Pemahaman dan pandangan yang sama akan memunculkan ketergantungan dalam kerja sama. Sehingga, tujuan kerja sama akan lebih mudah diwujudkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, rasa saling bergantung antar-*stakeholder* sudah terbentuk. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan para *stakeholder* dalam mendefinisikan peran masing-masing dan menjelaskan bahwa *stunting* merupakan permasalahan yang membutuhkan kontribusi semua pihak.

Namun begitu, realita dalam program DASHAT di Desa Surengede menunjukkan bahwa kader posyandu belum memahami mengenai *stunting*. Kurangnya pemahaman mengenai *stunting* ini

juga diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan. Tidak hanya itu, orang tua balita *stunting* juga belum sepenuhnya mengetahui mengenai *stunting*. Permasalahan tersebut sangatlah krusial. Selain minimnya pengetahuan, faktor lain yang menjadi penghambat program DASHAT di Desa Surengede adalah rasa malas orang tua untuk memberikan gizi yang cukup untuk balitanya. Sehingga, balita tidak mendapatkan asupan gizi yang baik dan lebih menyukai makanan *instant* dibandingkan makanan sehat dan bergizi lainnya.

#### b) *Shared Ownership of Process*

Menurut Ansel & Gash (dalam Agung, 2020), *shared ownership of process* berarti saling berbagi dalam proses kolaborasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan tanggung jawab setiap *stakeholder* yang terlibat. Dalam penyelenggaraan program DASHAT, elemen *shared ownership of process* dapat dikaji melalui kontribusi dan tanggung

jawab *stakeholder* dalam program DASHAT.

### **Gambar 1 Kegiatan Monitoring & Pengukuran Program DASHAT**



Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua *stakeholder* telah menjalankan tanggung jawab yang ada. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo selaku *leading sector* telah menjalani tanggung jawabnya. Misalnya dengan memfasilitasi anggaran, menyelenggarakan sosialisasi dan pengenalan program DASHAT ke masyarakat di Desa Surengede dan juga meluncurkan buku saku DASHAT sebagai media pengenalan program DASHAT. Kemudian, DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo juga melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sebulan sekali.

Kemudian LPTP Wonosobo juga telah melakukan tanggung jawabnya yang ditandai dengan

pemberian anggaran pelaksanaan. LPTP Wonosobo juga ikut terjun langsung ke dalam kegiatan program DASHAT termasuk pengantaran makanan ke rumah balita sasaran. LPTP Wonosobo juga melakukan monitoring dan evaluasi seminggu sekali.

### **Gambar 2 Pengukuran Balita Sasaran**



Bidan desa juga telah melaksanakan tanggung jawabnya yang ditandai dengan telah memonitoring tumbuh kembang balita sasaran dan juga menjadi jembatan antara orang tua balita sasaran dan juga DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo.

Kader posyandu selaku pelaksana program DASHAT telah melakukan tanggung jawabnya yang diwujudkan dengan melakukan semua kegiatan DASHAT mulai dari menyiapkan bahan makanan, memasak, menata, mengantarkan

makanan ke rumah balita sasaran, hingga melakukan pemantauan selama 90 hari berturut-turut.

Namun begitu, DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo belum dapat melakukan tanggung jawabnya secara maksimal dikarenakan DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo tidak merancang teknis pelaksanaan DASHAT dan menyerahkan segalanya ke Desa Surengede. Jika ditinjau dalam aspek *shared ownership of process*, kepemilikan bersama atas proses kolaborasi adanya program DASHAT memang sudah ada, namun tanggung jawab yang dimiliki oleh *stakeholder* belum merata dijalankan.

c) *Openess To Exploring Mutual Gains*

Menurut Ansel & Gash (dalam Agung, 2020), *openess to exploring mutual gains* adalah keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama. Dalam sub-fenomena ini, keuntungan *stakeholder* dalam terlibat pada program DASHAT menjadi focus utama yang akan dibahas. Keputusan *stakeholder* dalam terlibat program DASHAT

pastinya hadir bersama dengan suatu keuntungan yang ingin diraih.

Berdasarkan hasil penelitian, program DASHAT yang dilaksanakan di Desa Surengede belum bisa mendatangkan keuntungan yang maksimal bagi semua *stakeholder* yang terlibat. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan dalam mencapai keuntungan. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo dan LPTP memiliki keuntungan dikarenakan melalui program DASHAT, visi-misi dapat tercapai. Selanjutnya, bidan juga memiliki keuntungan dikarenakan sebagai ujung tombak pemberi layanan kesehatan, permasalahan *stunting* merupakan tanggung jawab bidan desa. Sehingga, melalui program DASHAT, bidan desa dapat terbantu dalam mengentaskan *stunting* di Desa Surengede. Namun begitu, kader posyandu tidak memiliki keuntungan yang dapat diraih dari adanya program DASHAT.

Selanjutnya, program DASHAT ini tidak diawali dengan rundingan awal untuk membahas keuntungan yang akan diraih masing-masing

*stakeholder*. Sosialisasi di awal hanya dilaksanakan untuk memperkenalkan program DASHAT tanpa menjelaskan mengenai keuntungan yang akan diraih tiap-tiap pihak. Tidak hanya itu, masing-masing *stakeholder* juga tidak bersifat terbuka mengenai keuntungan yang akan diraih. Sehingga, program DASHAT ini dilaksanakan tanpa ada kesepakatan mengenai tujuan-tujuan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi masing-masing pihak *stakeholder*.

### **Faktor-Faktor *Commitment To The Process* Dalam Program DASHAT di Desa Surengede**

James Agbodzakey (2024) menyatakan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi *commitment to the process* dalam *collaborative governance* yang kemudian dikelompokkan menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat.

#### **1) Faktor Pendorong**

##### **a. *Complex Problem***

Menurut Agbodzakey (2024), *complex problems* adalah permasalahan publik yang kompleks

yang memerlukan pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif dapat diwujudkan dalam partisipasi yang didasari dengan rasa kesatuan dan kemauan. Dalam elemen ini, dorongan dalam menciptakan solusi bersama-sama dan pemahaman *stakeholder* mengenai masalah kompleks menjadi focus utama yang dibahas.

Kaitannya dalam program DASHAT, semua *stakeholder* menyadari bahwa permasalahan mengenai stunting merupakan masalah kompleks yang membutuhkan kerja sama dari semua aktor. Adanya kesadaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dan latar belakang dari hadirnya kolaborasi di program DASHAT.

Berdasarkan hasil penelitian, DPPKBPPPA memiliki kesadaran untuk bekerja sama yang diwujudkan dalam pemberian edukasi dan sosialisasi melalui KIE. Sementara LPTP Wonosobo memahami perlunya sinergi lintas sektor akibat fluktuasi prevalensi stunting. Bidan desa menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami

pentingnya pencegahan stunting, terutama ibu hamil dan karang taruna. Sehingga, melalui kesadaran di atas, para *stakeholder* bersama-sama berkolaborasi dalam mengentaskan prevalensi *stunting* yang diwujudkan dengan adanya program DASHAT di Desa Surengede.

Sehingga, adanya kesadaran tersebut menjadi salah satu faktor pendorong *commitment to the process* dalam program DASHAT di Desa Surengede

#### **b. *Stakeholder Interdependence***

Menurut Agbodzakey (2024), *Stakeholder' Interdependence* adalah kesadaran stakeholder mengenai kepentingan untuk saling bergantung untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Selanjutnya, kesadaran stakeholder mengenai kepentingan untuk saling bergantung dapat mengatasi masalah publik yang kompleks dan dapat membantu dalam membangun *commitment to the process*. Dalam elemen ini, kesadaran dan kemauan *stakeholder* dalam bekerja sama menjadi focus utama yang akan dibahas.

Dalam keberjalanan program DASHAT, seluruh *stakeholder* telah memiliki kesadaran untuk saling bergantung yang ditunjukkan dengan kesadaran dan kemauan untuk saling bekerja sama dalam program DASHAT. Sehingga, kesadaran tersebut menjadi salah satu faktor pendorong dalam mewujudkan program DASHAT di Desa Surengede.

#### **c. Motivasi**

Menurut Agbodzakey (2024), Motivasi *stakeholder* adalah dorongan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan kesediaan *stakeholder* untuk terlibat melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan *collaborative governance*. Dorongan untuk bekerja sama dengan *stakeholder* lain hadir dari berbagai macam latar belakang. Kaitannya dengan *stunting*, setiap *stakeholder* memiliki dorongan yang berbeda-beda. Dorongan inilah yang menjadi sebuah motivasi para *stakeholder* untuk ikut berkontribusi dalam pengentasan *stunting* dan penyelenggaraan program DASHAT di Desa Surengede. Dalam elemen ini,

dorongan *stakeholder* untuk bergabung dalam program DASHAT menjadi focus utama yang akan dibahas.

Motivasi berkaitan dengan dorongan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* untuk bekerja sama dan kesediaan *stakeholder* untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi sebelumnya. Dalam keberjalanan program DASHAT, semua *stakeholder* memiliki dorongan yang berbeda-beda untuk bergabung dalam program DASHAT. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo memiliki dorongan untuk bergabung karena adanya tanggung jawab untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Wonosobo, LPTP Wonosobo memiliki dorongan untuk bergabung karena adanya visi-misi yang harus dicapai sebagai NGO, bidan desa memiliki dorongan untuk bergabung karena adanya tanggung jawab sebagai garis utama pelayan kesehatan di tingkat desa, dan kader posyandu memiliki dorongan untuk bergabung karena adanya arahan dari pemerintah dan tanggung jawabnya sebagai kader kesehatan desa. Dorongan-dorongan tersebut

mencerminkan keinginan *stakeholder* untuk terlibat dalam program DASHAT.

Selain itu, semua *stakeholder* yang terlibat dalam program DASHAT juga memiliki kemauan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam program DASHAT di Desa Surengede. Kemauan untuk menjalankan tugas merupakan salah satu bukti dari adanya motivasi untuk terlibat dalam program DASHAT di Desa Surengede.

## **2) Faktor Penghambat**

### **a. *Commitment***

Menurut Porter (dalam Darmawan, 2013) komitmen adalah kuatnya keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Selanjutnya, komitmen juga diwujudkan dalam keputusan awal *stakeholder* untuk bergabung dalam kolaborasi menunjukkan tekad yang mereka punya. Dalam elemen ini, tekad dan keputusan awal untuk bergabung

dalam program DASHAT menjadi focus utama.

*Stakeholder* memiliki keputusan awal untuk bergabung yang bermacam-macam. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo memutuskan untuk bergabung dikarenakan program DASHAT adalah program yang dibuat oleh BKKBN RI yang selanjutnya menjadi tanggung jawab DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan di Kabupaten Wonosobo. Sementara itu, keputusan awal bergabung yang dimiliki oleh LPTP Wonosobo dikarenakan adanya histori hubungan dengan pemerintah kabupaten dan DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo. Namun begitu jika ditelusuri lebih lanjut, bidan desa serta kader posyandu tidak memiliki keputusan awal dikarenakan pelaksanaan program DASHAT merupakan putusan dan arahan pemerintah kabupaten. Selanjutnya, terdapat tekad semua *stakeholder* dalam menjalankan program DASHAT. Hal ini ditunjukkan dengan peranan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh masing-masing *stakeholder*.

Sehingga, meskipun *stakeholder* memiliki tekad untuk bekerja sama pada program DASHAT, keputusan awal belum terbentuk pada bidan desa & kader posyandu. Adanya permasalahan ini menjadikan *commitment* sebagai faktor penghambat dalam *commitment to the process* dalam program DASHAT.

#### **b. Trust**

Menurut Chen (dalam Agbodzakey, 2024) kepercayaan adalah ikatan yang tulus di antara para pemangku kepentingan yang biasanya dicontohkan dengan percaya satu sama lain. Menurut Agbodzakey (2024), kepercayaan menjadi elemen penting dalam *commitment to the process* karena membantu untuk mempertahankan keterlibatan kolaborasi. Dalam elemen ini, yang menjadi focus utama adalah rasa percaya antar *stakeholder*. Rasa percaya ini yang menjadi salah satu kunci utama keberhasilan kerja sama dalam pengentasan *stunting*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, semua *stakeholder* memiliki rasa saling percaya selama

program DASHAT berlangsung. Sebagai contoh pada DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo dan LPTP Wonosobo, rasa saling percaya tersebut tumbuh dari adanya histori hubungan yang telah hadir sebelumnya. Bidan desa juga memiliki rasa saling percaya dikarenakan tim yang berkontribusi dapat bekerja sama dengan baik. Namun, unsur kepercayaan tidak dapat diperoleh dari para kader posyandu di Desa Surengede. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan program DASHAT yang dilakukan oleh kader posyandu semata-mata berdasarkan instruksi langsung dari pemerintah desa dan bidan desa. Akibatnya, para kader posyandu tidak terlibat dalam diskusi atau musyawarah yang dapat membangun rasa saling percaya di antara pemangku kepentingan lainnya. Sehingga, rasa kurang percaya dan kurangnya pelibatan kader posyandu dalam musyawarah dalam membangun rasa saling percaya menjadi salah satu faktor penghambat *commitment to the process* dalam program DASHAT.

### c. *Protocols*

Menurut North (Dalam Agbodzakey, 2024), *protocol* adalah penghubung bagi keterlibatan stakeholder dalam memanfaatkan kekuatannya satu sama yang lain untuk memecahkan masalah publik. Partisipasi stakeholder dalam menetapkan *protocol* dalam keberjalanan *collaborative governance* sangat penting untuk *commitment to the process* terkait. Selain itu, diperlukan *protocol* yang adil bagi semua stakeholder agar menciptakan keyakinan dalam proses *collaborative governance*. dalam elemen ini, *protocol* yang adil dan partisipasi stakeholder dalam menetapkan *protocol* menjadi focus utama yang akan dibahas.

*Protocols* dalam program DASHAT berkaitan dengan partisipasi *stakeholder* dalam menyusun *porotocol* yang adil dan merata bagi semua *stakeholder* terlibat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, *protocol* yang ada belum terbagi secara merata. Hal ini dikarenakan kader posyandu sebagai pelaksana program DASHAT memiliki tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan stakeholder

lainnya, Peran dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan kader posyandu tidak sebanding dikarenakan tidak ada intensif yang diberikan kepada kader posyandu. Tidak hanya itu, partisipasi dalam penyusunan protocol juga tidak melibatkan semua stakeholder yang ada. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo sebagai *leading sector* tidak memiliki acuan dalam pelaksanaan teknis. Sehingga, bidan desa dan Pemerintah Desa Surengede yang merancang pelaksanaan teknis secara mandiri. Lebih jauh, *protocol* yang tidak adil serta kurangnya partisipasi kader posyandu dalam menyusun *protocol* dalam program DASHAT menjadi salah satu faktor penghambat *commitment to the process* dalam program DASHAT

#### **d. *Representation & Participation***

Menurut Agbodzakey (2024), Representation & Participation adalah tekad stakeholder untuk melakukan tindakan kolektif yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan kolaboratif. Tindakan kolektif diwujudkan dengan keterwakilan

yang inklusif dan partisipasi. Partisipasi stakeholder dapat tumbuh melalui interaksi rutin. Dalam melaksanakan program DASHAT, setiap stakeholder perlu untuk memiliki representasi dan partisipasi dalam setiap kegiatan kaitannya dengan program DASHAT.

*Representation & Participation* berkaitan dengan tindakan kolektif oleh *stakeholder* yang ditunjukkan dengan keterwakilan serta partisipasi aktif dalam menjalankan program. Partisipasi *stakeholder* juga dapat tumbuh melalui interaksi rutin yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, *stakeholder* dapat menyampaikan pandangan dan pendapat secara luas dan bebas. Namun begitu, kader posyandu tidak pernah memberikan pandangan atau pendapat dikarenakan sistematisa program DASHAT telah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga, kader posyandu hanya menjalankan tugas sesuai arahan. Selanjutnya, pelaksanaan program DASHAT tidak memiliki interaksi rutin yang secara khusus membahas mengenai program DASHAT. Namun begitu, interaksi

tetap dilaksanakan setiap harinya melalui *WhatsApp Group*. Sehingga, kurangnya partisipasi kader posyandu dalam memberikan pandangan secara luas dan bebas serta tidak adanya interaksi rutin yang membahas mengenai program DASHAT menjadi salah satu faktor penghambat *commitment to the process* dalam program DASHAT.

#### e. *Consensus*

Menurut Agbodzakey (2024), *consensus* adalah kesepakatan di antara *stakeholder* terkait dengan penyelesaian dan tindakan yang dilakukan dalam mengentaskan masalah publik. Pengambilan keputusan dari perspektif yang berbeda akan menghasilkan *consensus*. Dalam mendapatkan *consensus*, diperlukan dialog dan rundingan untuk mencapai titik temu. Sehingga, dalam elemen ini dialog serta kesepakatan para *stakeholder* menjadi fokus utama yang akan dibahas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, kesepakatan dan dialog tidak terjadi secara sempurna. Program DASHAT dilaksanakan

sebagai bentuk birokrasi dan diselenggarakan karena adanya arahan saja. Diskusi awal yang terjadi tidak mengikutsertakan beberapa *stakeholder*. Sehingga, tidak semua *stakeholder* ikut andil dalam pembuatan kesepakatan. Lebih jauh, tidak adanya kesepakatan awal serta dialog awal yang menghasilkan *consensus* untuk semua *stakeholder* ini menjadi salah satu faktor penghambat *commitment to the process* dalam program DASHAT.

#### f. *Leaders*

Menurut Agbodzakey (2024) Pemimpin adalah *key player* dalam *collaborative governance* yang bertanggung jawab dalam keberhasilan *collaborative governance*. Dalam elemen ini, pemimpin yang dapat memfasilitasi peran dalam proses kolaborasi akan menjadi fokus utama yang akan dikaji.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo sebagai *leading sector* telah menjadi pemimpin yang memfasilitasi dan bertanggung jawab. Hal ini

dibuktikan dengan pemberian anggaran sebagai bentuk fasilitas untuk melaksanakan program DASHAT di Desa Surengede. Selain itu, DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo dapat melakukan monitoring secara rutin satu bulan sekali. Namun begitu, DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo belum bisa merancang teknis pelaksanaan program DASHAT. Sehingga, teknis pelaksanaan diserahkan kepada pemerintah desa serta perangkatnya. Sehingga, kurangnya peran DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo sebagai leader dalam merancang teknis pelaksanaan program DASHAT menjadi salah satu faktor penghambat collaborative governance dalam program DASHAT.

## **Kesimpulan**

Program DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan pusat gizi dan pelayanan pada baduta *stunting*, ibu menyusui, dan ibu hamil KEK. Program DASHAT merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini telah direalisasikan di berbagai desa maupun kecamatan di seluruh Indonesia termasuk di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar. Program DASHAT dilaksanakan selama 90 hari berturut-turut dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan makanan di dapur yang sudah disiapkan sesuai ketentuan, sehingga proses pengantaran dan pemantauan sasaran *stunting* bisa dilakukan dengan maksimal. Program DASHAT yang dilaksanakan di Desa Surengede diselenggarakan oleh DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo dengan beberapa *stakeholder* lain yaitu LPTP Wonosobo, bidan desa, serta kader posyandu Desa Surengede.

Dalam pelaksanaan program DASHAT diperlukan kontribusi semua stakeholder yang terlibat. Namun begitu, dalam pelaksanaan program DASHAT, pemenuhan dimensi *commitment to the process* di Desa Surengede belum bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan beberapa permasalahan yang masih ditemukan. Seperti kurangnya pemahaman kader

mengenai stunting, tidak adanya SOP yang jelas, serta tidak ada musyawarah yang dilaksanakan untuk mendiskusikan keuntungan bagi stakeholder. Lebih jauh, faktor-faktor pendorong *commitment to the process* dalam program DASHAT memang sudah terbentuk. Faktor pendorong tersebut menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan keberhasilan program DASHAT. Namun begitu, faktor-faktor penghambat *commitment to the process* dalam program DASHAT juga masih ditemukan. Adanya faktor penghambat tersebut mengurangi efektivitas program DASHAT dan dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu mengentaskan stunting di Desa Surengede.

### Saran

Berdasarkan penelitian mengenai *commitment to the process* dalam program DASHAT di Desa Surengede, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk memaksimalkan *commitment to the process* agar kerja

sama DASHAT dapat dilaksanakan secara maksimal

1. DPPKBPPPA harus melaksanakan evaluasi mengenai bimbingan teknis & pemberian edukasi kaitannya dengan *stunting* kepada kader posyandu.
2. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo harus melakukan penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*) & perencanaan teknis pelaksanaan program yang jelas dan terstruktur dan alur kerja sebagai pedoman pelaksanaan program DASHAT di Kabupaten Wonosobo.
3. Semua *stakeholder* harus melaksanakan diskusi awal untuk membahas keuntungan antar-stakeholder dan negosiasi kesepakatan sebagai bentuk musyawarah yang dapat dilakukan oleh para *stakeholder* dalam membahas keuntungan-keuntungan yang dapat diraih saat bergabung dalam program DASHAT.
4. DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo selaku *leading sector* dapat memberikan

ruang untuk berpendapat secara bebas dan luas melalui diskusi yang dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan semua *stakeholder* yang ada.

### Daftar Pustaka

- Afandi, dkk. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: Shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Development Studies Research*, 10(1) doi:<https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Afrida, dkk. (2024). Collaborative Governance dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Sidoarjo. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1)
- Agbodzakey, J. (2024). Commitment to the Process of Collaborative Governance. In: Collaborative Governance Primer. *SpringerBriefs in Political Science*. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-57373-6\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-57373-6_8)
- Agranoff, Robert. (2009). *Collaborating to Manage: a Primer for Public Sector*.
- Anggriani Alamsyah. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, Chris & Gash, Alison. (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 28. 16-32. [10.1093/jopart/mux030](https://doi.org/10.1093/jopart/mux030).
- BKKBN. (2022). *Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas (DASHAT) Ragam Menu Sehat dan Bergizi untuk Mahasiswa Peduli Stunting*.
- Candarmaweni, & Amy Yayuk, S. R. (2020). Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from pandeglang. *Les Ulis: EDP Sciences*. doi:<https://doi.org/10.1051/e3conf/202021101014>
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117-137. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617>
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2022. The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable. Rome, FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0639en>

Hidayat, dkk. (2022). Pencegahan Kasus Stunting melalui Program Dapur Sehat Stunting (DASHAT) di Desa Tambi. *Servis : Jurnal Pengabdian dan Layanan Kepada Masyarakat*, 1(1).

Manita, dkk. (2022). Optimalisasi Kader DASHAT (Dapur Sehat Stunting) Untuk Pengendalian Stunting. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 4(3)

Stunting di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. *Jurnal JPKEs*, 2(03).

Purnamasari. (2022). Profil Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Kalikajar 1 Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Keperawatan*, 8(1).

### **Dokumen & Perundang-Undangan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

Laporan Percepatan Penurunan Stunting Semester 1 Provinsi Jawa Tengah

Keputusan Bupati Wonosobo No 440/37/2021 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Wonosobo.